

**PERAN KOPERASI WANITA (KOPWAN) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
DI WILAYAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Fedianty Augustinah

Dosen Prodi Administrasi Niaga/Bisnis , Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : fediaugust@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan fokus penelitian yaitu 3 (tiga) nama koperasi yang berlokasi di 3 (tiga) Desa, yakni ; 1) Koperasi Wanita “Puan Jaya” di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 2) Koperasi Wanita “Tutur Mandiri” di Desa Sooko Kecamatan Sooko, dan 3) Koperasi Wanita “Rukun Makmur” di Jambuwook Kecamatan Trowulan. Kondisi usaha koperasi yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Mojokerto, secara rata-rata berjalan baik dan menjalankan usaha sesuai kaidah usaha perkoperasian. Akan tetapi ditinjau dari skala usaha ada 1 (satu) koperasi terpilih masih berada dalam skala usaha relatif kecil dan lemah, sehingga untuk dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar di kawasan rawan bencana, masih perlu diberikan pendampingan ke arah peningkatan peran koperasi, khususnya pada masa-masa terjadi bencana. Karena ketika terjadi bencana yang melanda kawasan di mana koperasi beroperasi, dapat diduga dampak bencana akan berpengaruh kepada sarana prasarana serta kegiatan usaha koperasi dan perekonomian masyarakat anggota koperasi dan masyarakat umum lainnya, baik dari sisi produksi, volume usaha, ketersediaan bahan baku maupun ekonomi rumah tangga. Model pemberdayaan ekonomi melalui Fasilitas Perkuatan Usaha Program Dana Bergulir.

Kata Kunci: Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi, Kawasan Rawan Bencana

ABSTRACT

This study uses research focus are 3 (three) names cooperatives located in the 3 (three) village, namely; 1) Women's Cooperative "Puan Jaya" in the village of Kepuhanyar, District Mojoanyar, 2) Women's Cooperative "Said Self" in the village of Sooko Sooko, and 3) Cooperative Women 'Rukun Makmur "in Jambuwook District Trowulan. Conditions that are cooperative efforts in disaster-prone areas in Mojokerto, in average running well and operating within the rules of the cooperative effort. But in terms of business scale of 1 (one) cooperative elected is still in business scale is relatively small and weak, so as to be able to play a role in the economic empowerment of exposure in disaster-prone areas, still need to be given assistance towards increasing the role of cooperatives, particularly in times the event of a disaster. Because when disaster strikes that hit the region in which the cooperative operates, can be expected impact of disasters will affect the infrastructure and business activities of cooperatives and the public economy cooperative members and communities other common, both in terms of production, volume of business, the availability of raw materials and household economy , Model of economic empowerment through Strengthening Business Facilitation Program Revolving Fund

Keywords: Cooperation, Economic Empowerment, Disaster Prone Areas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ; *Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi*. Sedangkan landasan, azas dan tujuan di dalam pasal 2 dinyatakan bahwa ; *Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dan pada pasal 3 dinyatakan bahwa ; *Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan*, dengan tujuan yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa ; *Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan*.

Ini berarti, dengan berbekal landasan, azas dan tujuan tersebut, di manapun Koperasi berada dan beroperasi, keberadaannya akan menjadi tumpuan dan harapan dalam upaya peningkatan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi terutama dalam menyambut MEA . Dengan demikian, cukup beralasan jika di suatu daerah, di mana lembaga koperasi ada, masyarakat sebagai anggota dan atau masyarakat pada umumnya berharap kepada Koperasi untuk bisa membantu dan berperan di dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial, dalam upaya untuk penanggulangan, pengentasan dan upaya meminimalisir peningkatan kemiskinan.

Permasalahan yang timbul dan menimpa masyarakat akibat bencana, bagaimanapun harus diantisipasi dan diatasi dengan berbagai kebijakan dan program kerja oleh berbagai pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha pada dasarnya dapat dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan tahapan kegiatan dalam penanggulangan bencana, yakni tahapan ; Pra Bencana, Darurat/Kedaruratan, dan Pasca Bencana. Peranan terhadap kegiatan penanggulangan bencana dari berbagai pihak sangat diharapkan, terutama dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat, memulihkan tata kehidupan dan merehabilitasi kondisi kehidupan ke arah kehidupan yang lebih baik, khususnya dengan implementasi kebijakan dan/atau program kerja di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat terparar bencana melalui kegiatan pendampingan peran pemberdayaan perekonomian masyarakat terparar bencana di daerah-daerah rawan bencana.

B. Rumusan Masalah

Kondisi perubahan akibat terpapar bencana akan menciptakan dan membuat tata kehidupan normal menjadi tidak normal dan memunculkan kerentanan komunitas dalam berbagai hal. Ketidak normalan dalam tata kehidupan masyarakat antara lain dapat terjadi dalam berbagai aspek ; sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan mental psikologis yang rentan, khususnya pada masa darurat, saat transisi darurat dan pada masa pasca bencana. Kehidupan tidak normal akibat dampak bencana tidak saja melanda masyarakat terpapar secara perorangan, tetapi juga melanda masyarakat secara komunal, fisik maupun non-fisik serta merusak tata kelembagaan yang ada, baik lembaga publik maupun ekonomi, seperti sarana prasarana layanan publik milik pemerintah, pengusaha dan atau milik masyarakat koperasi serta pasar sebagai lembaga ekonomi di daerah terpapar bencana. Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah meningkatkan peranan koperasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat menyambut MEA pada kawasan rawan bencana
- b. Bagaimanakah meningkatkan peranan koperasi dalam kegiatan pengurangan resiko bencana bagi anggota dan masyarakat terpapar bencana di wilayah kerja koperasi.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat sebagai masukan pengambil kebijakan tentang peran koperasi wanita dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto, bagi anggota koperasi dan/atau masyarakat umum, diarahkan kepada tercipta dan terwujudnya ketahanan masyarakat koperasi dan masyarakat umum di daerah rawan bencana dalam mengantisipasi resiko bencana, serta percepatan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar bencana, baik perorangan, kelompok, dan/atau kelembagaan, melalui peningkatan kinerja kegiatan dan program dengan sasaran peningkatan peran koperasi, bagi anggota dan atau masyarakat umum di sekitar wilayah kerja koperasi, agar menjadi masyarakat tangguh, dari sisi ekonomi rumah tangga, dan kehidupan sosial.

D. Kerangka Teori

Seperti diketahui, bahwa Bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan, Pasal 1. *adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,*

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan yang dimaksud Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu yang dimaksud dengan Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Pengertian bencana sebagaimana diuraikan di atas, khususnya untuk bencana alam, akhir-akhir ini sering terjadi dan melanda daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dikenal sebagai kawasan rawan bencana, karena Jawa Timur memiliki hampir seluruh jenis bencana alam ; Gempa bumi, Tsunami, Gunung Api, Banjir, Kekeringan, Angin topan, dan Tanah longsor, sehingga dalam peta kebencanaan banyak wilayah dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.

Pemberdayaan secara etimologis, berasal dari kata “berdaya” yakni bentuk upaya revitalisasi masyarakat sebagai aktor penting dalam pemerintahan. Pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* berimplikasi pada munculnya dua aktor lain selain negara (*state*) seperti masyarakat (*society*) maupun kelompok intermediari yakni media dan partai politik menjadikan konteks pemberdayaan menjadi penting (Peter, 2000). Adapun makna pemberdayaan (*empowering*) dalam bahasa Indonesia serapan ditulis empowerisasi, yang pada dasarnya adalah memberikan power kepada masyarakat untuk menjadikan entitas ini sebagai aktor yang perlu diperkuat eksistensi dan posisinya. Upaya pemberdayaan sudah ada sejak tahun 1980 bersamaan dengan diseminasi gagasan *good governance* di seluruh dunia. Untuk kasus Indonesia, gaung pemberdayaan baru mulai pada sekitar akhir tahun 2006. Dalam hal ini ada dua kecenderungan mendasar terhadap munculnya pemberdayaan ; **Pertama**, Kecenderungan primer, yakni munculnya limitas kapasitas yang dimiliki negara dalam fungsi kontrol maupun regulator sehingga diperlukan adanya kekuatan ekstra parlemen independen untuk mengontrol. **Ke dua** ; Kecenderungan sekunder adalah perlunya penguatan kapasitas yang diperlukan oleh masyarakat dalam memperkuat kapasitas instusionalisasinya sebagai aktor yang berdaya.

Penyebutan *Community* (komunitas) merupakan bentuk masyarakat berdaya yang mampu independen dan terinstusionalisasi secara kolektif. Dari sisi sosiologis, terdapat tiga

makna pemberdayaan ; 1) *Enabling*, kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa memperkuat kemandirian secara pribadi maupun kolektif. 2) *Empowering*, yakni suatu kondisi yang memberi kekuatan penggerak bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, 3) *Supporting*, yakni kondisi yang mendukung masyarakat menemukan potensinya untuk didayagunakan semaksimal mungkin. Dalam konteks ini, pemberdayaan sering juga disebut *alternative development*, yang kemudian menjadikan makna dari pemberdayaan berkembang ke berbagai hal seperti *community development* karena upaya pembangunan mengarah pada manusia (*people centered development*). Di mana *Community development* pada dasarnya merupakan istilah teknis yang mendeskripsikan model pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sinergisitas dengan pihak lain. Kondisi ini menjadikan konteks relasi dalam komunitas menjadi penting untuk memperkuat jejaring dan lain sebagainya, sehingga secara garis besar, konteks pemberdayaan yang dilakukan di dalam *community development* pada dasarnya bersifat *charity* karena hanya menstimulus adanya motivasi “berdaya” dari setiap anggota masyarakat. Namun dalam perkembangannya, justru konteks *charity* berubah menjadi *grant* akibat empowerisasi itu sendiri, yang pada akhirnya mengalami transformasi dari sekadar berbasis *social capital* ke arah *economic capital*. Kondisi dan perkembangan itulah yang kemudian menjadikan konteks pelayanan (*services*) kemudian berkembang dari tujuan dan arah yang semula *non profit* berubah menuju *profit oriented* dengan berbasis kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Ginanjar K dalam *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijakan, dan Penerapan*, 1997 , menyatakan bahwa ; Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan dan harapan.

Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan pembukaan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan, upaya pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber kemajuan ekonomi seperti ; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat lemah. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya penguatan individu anggota

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai budaya modern, kerja keras, hemat, keterbukaan, dan akuntabilitas adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan, termasuk pembaharuan institusi sosial dan integrasinya ke dalam kegiatan pembangunan dan peranan masyarakat itu sendiri. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Perlindungan dan keberpihakan kepada yang lemah merupakan dasar dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan upaya pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Dalam hal ini, Friedman (1992) menyatakan; *The empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning.* Pemberdayaan berperan mewujudkan konsep masyarakat belajar atau *concept of societal learning* dengan cara mempertemukan antara pendekatan *top down approach* dengan pendekatan *bottom-up approach* yang pada dasarnya kontradiktif. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Proses perubahan tersebut berlangsung secara alamiah dengan asumsi setiap anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku sosial ikut dalam proses perubahan tersebut. Dalam arti luas, pengertian pemberdayaan dapat diterjemahkan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan dalam konsep (wacana) politik menurut Dahl (1963:50) merupakan kekuatan yang menyangkut kemampuan seseorang (pihak pertama) untuk mempengaruhi orang lain (pihak kedua) yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak kedua. Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif, dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberdayakan untuk merumuskan sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus di antara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (*stakeholders*) akibat proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik, yang berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Sasaran program pemberdayaan masyarakat mengarah pada penduduk miskin dan perempuan, yang kebanyakan penganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama.

Berawal dari hal sederhana, maka semangat masyarakat dalam membangun, walaupun dengan cara dan pemahaman mereka sendiri sendiri, akan terus berlanjut dan keberdayaan masyarakat dalam artian mandiri tanpa menggantungkan terhadap pemerintah akan tercapai. Kondisi seperti di atas, akan membuat masyarakat merasa nyaman, tenteram dan dihargai, sehingga iklim berusaha akan terjaga dan semangat membangun terus terpelihara di dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari peran serta kelompok masyarakat yang harus dan terus didampingi oleh pihak pemberdayaan. Pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah riil dalam penanganannya, langkah untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- 2) Menyadarkan masyarakat untuk berkembang. Proses ini dilakukan dengan mengajak masyarakat mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey* dan *participatory analysis*.
- 3) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat menggambarkan dan merencanakan wilayah, disebut *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan membentuk rasa ke-berpihakan kepada masyarakat.
- 4) Memperkuat potensi yang ada, dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok/komunitas yang dikembangkan dengan memberikan masukan / input serta membuka berbagai peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya. Secara aplikatif pemberdayaan (*empowerment*) terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah, dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal sebagai berikut.
 - a. Penguatan akses (*accessibility empowerment*).
 - b. Penguatan teknis (*technical empowerment*).

Pemberdayaan (*empowerment*) diartikan sebagai kegiatan memberikan power kepada masyarakat agar menjadi entitas yang memiliki kekuatan dalam eksistensi posisi di lingkungannya. Ada 3 (tiga) kunci pemberdayaan yang dapat dilakukan (Ken Blanchard, 2002), yakni :

1. Berbagi informasi akurat dengan setiap orang adalah kunci awal untuk memberdayakan kelompok sasaran, dengan :
 - a. Membiarkan orang memahami situasi yang sebenarnya terjadi;
 - b. Membangun kepercayaan di seluruh target pemberdayaan;
 - c. Menghilangkan pemikiran hirarkis tradisional;
 - d. Membantu orang menjadi lebih bertanggungjawab;

- e. Mendorong orang untuk bertindak seperti pemberdaya.
2. Menciptakan otonomi melalui batas wewenang kerja, dengan langkah :
 - a. Membangun otonomi atas dasar *sharing* informasi;
 - b. Melakukan klarifikasi Visi / tujuan dengan meminta masukan dari setiap orang obyek pemberdayaan;
 - c. Membantu menterjemahkan Visi ke dalam peran dan sasaran pemberdayaan;
 - d. Menentukan nilai-nilai dan aturan yang mendasari tindakan yang dikehendaki, karena jika nilai-nilai jelas maka pembuatan keputusan akan lebih mudah;
 - e. Mengembangkan struktur dan prosedur yang dapat memberdayakan orang,
 - f. Mengingatkan semua orang yang menjadi obyek, bahwa pemberdayaan merupakan suatu perjalanan.
3. Mengganti pemikiran hirarkis dengan tim mandiri, dengan mengajarkan kepada orang lain segala sesuatu yang dapat mereka lakukan agar tidak tergantung, untuk itu perlu:
 - a. Tim yang berdaya agar dapat berbuat lebih banyak dibanding individu yang berdaya;
 - b. Orang tidak mulai dengan pengetahuan tentang bagaimana bekerja dalam tim mandiri, mereka akan berdaya secara langsung dalam sebuah team;
 - c. Ketidak puasan harus disadari merupakan langkah alami dalam proses pemberdayaan;
 - d. Setiap orang harus dilatih ketrampilan-ketrampilan Tim;
 - e. Komitmen dan dukungan harus berasal dari atasan atau pihak pemberdaya; Tim yang memiliki informasi dan ketrampilan dapat menggantikan pemikiran yang lama

E. Metode Penelitian

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2010). Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur fenomenologis (Moleong, 2007). Teknik dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan secara umum. Beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini: 1) Mengolah data dan mengintrepetasikan data untuk dianalisis. 2) Membaca keseluruhan data. 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya 4) Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan *setting*, orang- orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau

laporan kualitatif. 6) Menginterpretasi atau memaknai data. Dalam penelitian ini data yang didapat ditulis dalam transkrip wawancara, lalu dikoding, dipilah tema-tema sebagai hasil temuan, dan selanjutnya dilakukan interpretasi data.

F. Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari kondisi ancaman dan kerawanan bencana. Data bencana yang paling sering dihadapi oleh Kabupaten Mojokerto adalah bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana longsor dan bencana kekeringan, dan tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan ancaman resiko bencana akibat kegagalan teknologi, mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan dan kawasan pegunungan yang rawan longsor. Melihat kondisi dan situasi Kabupaten Mojokerto, yang berada di dalam kawasan rawan bencana, maka tata kehidupan dari masyarakat dan lembaga koperasi yang ada, dalam setiap aktivitas dan usahanya diperkirakan akan sering menghadapi resiko terparap bencana, yang setiap saat dapat terjadi. Pengalaman menunjukkan, pada saat bencana melanda, tata kehidupan yang sebelumnya normal, tenang, baik dan harmonis, berubah mendadak menjadi tidak menentu dan tidak lagi normal, karena terdampak oleh kerusakan fisik maupun non fisik serta kemungkinan adanya sebagian dari masyarakat yang harus pergi dan atau terpaksa pergi meninggalkan daerah asalnya untuk menjadi Pengungsi.

Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, munculnya pengangguran, kegiatan pendidikan terganggu, tingkat kesehatan masyarakat menurun, dan tingkat pendapatan menjadi rendah, yang tentu juga akan melanda lembaga Koperasi, masyarakat umum, atau masyarakat anggota koperasi itu sendiri. Jika kondisi di atas terus berlangsung dalam jangka panjang, diduga akan menciptakan *multiplier effect* terhadap tata kehidupan dan perekonomian masyarakat secara luas, yang akhirnya akan mengganggu perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah, ekonomi wilayah dan perekonomian regional.

Gambar. 1
Peta Kabupaten Mojokerto



1. Kondisi Geografis

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dimana luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47" Lintang Selatan. Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kota Batu
- Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

- Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto

Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan.

2 . Topografi Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatilejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat. Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut.

3. Hidrologi dan Klimatologi

Secara umum, curah hujan di Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Timur tidak terlalu jauh berbeda. Kabupaten Mojokerto pada bulan Juni sampai dengan September/Oktober terjadi musim kemarau dan pada bulan Nopember/Desember sampai bulan Mei mengalami musim penghujan.

Tabel. 1
Curah Hujan Di Kabupaten Mojokerto

Stasiun Pengamatan	Total dan Rata-rata Curah Hujan 10 Tahun Terakhir	
	Curah Hujan	Rata-rata Curah Hujan
Cakarayam	17509	1751
Manting	3724	372
Pacet	25182	2518
Pandan	22682	2268
Janjing	21989	2199
Trawas	22890	2289
Sukosari	8555	856
Padusan	5643	564
Pugeran	13838	1384
Sumbersoko	15935	1594
Klegen	18021	1802
Mojosari	18000	1800
Pudaksari	16560	1656
Tampung	15359	1536
Tangunan	18336	1834
Pasinan	19432	1943
Trowulan	18053	1805
Kasiyan	16625	1663
Pandansili	12762	1276
Ketangi	14758	1476
Sambiroto	19928	1993
Gedeg	20291	2029
Terusan	17391	1739
Wates	6581	658
Mernung	6151	615

Sumber: Dinas PU Pengairan Kabupaten Mojokerto

4. Ketinggian Lahan

Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan di atas 600 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu

ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam menetapkan wilayah tanah usaha. Luas daerah berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel . 2
Luas Lahan Berdasarkan Ketinggian

No.	Ketinggian Tempat (meter)	Luas	
		Ha	%
1.	0 – 500	849.98	87,69
2.	500 – 1000	119.28	12,31
	Total	969.36	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto

5. Perkembangan Penduduk Kabupaten Mojokerto

Perkembangan penduduk kabupaten Mojokerto laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berikut data jumlah penduduk kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin untuk tiap kecamatan.

Tabel . 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto
Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Bulan Oktober Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jatirejo	22.037	21.405	43.442
2.	Gondang	21.646	21.362	43.008
3.	Pacet	29.625	29.291	58.916
4.	Trawas	15.315	15.241	30.556
5.	Ngoro	40.737	40.961	81.698
6.	Pungging	38.927	38.511	77.438
7.	Kutorejo	32.894	32.045	64.939
8.	Mojosari	39.884	39.205	79.089
9.	Dlanggu	28.436	28.114	56.550
10.	Bangsals	26.246	25.740	51.986
11.	Puri	38.369	37.774	76.143
12.	Trowulan	38.485	37.560	76.045
13.	Sooko	37.458	36.751	74.209
14.	Gedeg	29.481	29.129	58.610
15.	Kemlagi	29.385	29.295	58.680
16.	Jetis	43.297	42.016	85.313
17.	Dawarblandong	25.761	26.184	51.945
18.	Mojoanyar	25.096	24.695	49.791

Jumlah	563.079	555.279	1.118.358
---------------	---------	---------	-----------

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto

Kondisi usaha koperasi yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Mojokerto, secara rata-rata berjalan baik dan menjalankan usaha sesuai kaidah usaha perkoperasian. Akan tetapi ditinjau dari skala usaha ada 1 (satu) koperasi terpilih masih berada dalam skala usaha relatif kecil dan lemah, sehingga untuk dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar di kawasan rawan bencana, masih perlu diberikan pendampingan ke arah peningkatan peran koperasi, khususnya pada masa-masa terjadi bencana. Karena ketika terjadi bencana yang melanda kawasan di mana koperasi beroperasi, dapat diduga dampak bencana akan berpengaruh kepada sarana prasarana serta kegiatan usaha koperasi dan perekonomian masyarakat anggota koperasi dan masyarakat umum lainnya, baik dari sisi produksi, volume usaha, ketersediaan bahan baku maupun ekonomi rumah tangga. Atas dasar uraian di atas, peran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar bagi koperasi sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kondisi ekonomi masyarakat dan koperasi agar siap dan dapat melaksanakan kegiatan usahanya serta mampu melayani kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar. Salah satu model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan adalah dengan fasilitasi Perkuatan Usaha Melalui Program Dana Bergulir. Dimana dalam penelitian ini menggunakan Pengurus dan Anggota koperasi wanita sebagai sampel penelitian yaitu 3 (tiga) nama koperasi yang berlokasi di 3 (tiga) Desa, yakni ; 1) Koperasi Wanita “Puan Jaya” di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 2) Koperasi Wanita “Tutur Mandiri” di Desa Sooko Kecamatan Sooko, dan 3) Koperasi Wanita “Rukun Makmur” di Jambuwok Kecamatan Trowulan.

Dengan penjelasan bahwa, model pemberdayaan ekonomi melalui Fasilitasi Perkuatan Usaha Program Dana Bergulir, sebagai berikut :

- 1) Arah pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar yang tinggal di daerah rawan bencana, baik ekonomi rumah tangga, ekonomi anggota koperasi dan ekonomi masyarakat umum yang berada di sekitar wilayah kerja koperasi, dengan kegiatan antara lain; 1) Identifikasi masalah kebutuhan pemberdayaan untuk masyarakat terpapar bencana, 2) Analisis kebutuhan pemberdayaan, meliputi analisis *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* terhadap anggota koperasi dan atau masyarakat pengusaha kecil yang terpapar bencana dan berada di wilayah kerja koperasi, 3) Peningkatan peran koperasi yang diperlukan, 4) Penyusunan rencana aksi sebagai pedoman apabila terjadi bencana.

2) Fokus pengelolaan usaha, meliputi ; Manajemen Kredit, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran. Di mana untuk pendampingan ; a) Manajemen Kredit, diperlukan mengingat ke tiga koperasi yang dipilih merupakan koperasi dengan bidang usaha Simpan Pinjam (KSP). Pendampingan meliputi kegiatan analisis kredit, analisis sumber dana dan analisis harga, b) Manajemen Keuangan, meliputi pengelolaan Arus Kas, Piutang dan Hutang serta Laporan Keuangan dan analisisnya, c) Manajemen Pemasaran, meliputi upaya dan cara untuk meningkatkan volume usaha, peningkatan pangsa pasar dan perluasan pasar dan segmennya (penetrasi pasar) dan perluasan jaringan pelanggan serta jaringan usaha.

Mengingat dari ke tiga koperasi terpilih untuk penelitian peran koperasi dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar pada kawasan rawan bencana di Wilayah Kabupaten Mojokerto , memiliki bidang usaha yang sama, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maka model pemberdayaan yang dilaksanakan lebih ditekankan kepada pengembangan modal usaha dan tingkat kolektibilitas pinjaman (piutang) yang telah diberikan dengan fokus kondisi permodalan dan kolektibilitas pinjaman dilakukan karena ke tiga koperasi tersebut di atas masing-masing telah mendapatkan dana hibah untuk modal koperasi masing—asing sebesar Rp.50.000.000,- yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam 2 (dua) tahap pemberian/pencairan. Dari hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Propoinsi Jawa Timur terhadap masalah permodalan diperoleh data bahwa dana hibah yang telah diterima oleh masing-masing koperasi di atas telah mampu meningkatkan kegiatan usaha koperasi dan peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitar koperasi yang sebagian besar bergerak dalam kegiatan usaha kecil sebagai pengrajin makanan dan usaha pertanian serta perikanan.

G. Penutup

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu menyangkut pelaksanaan penelitian tentang Peran Koperasi Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpapar Pada Kawasan Rawan Bencana Di Wilayah Kabupaten Mojokerto, maka sebagai penutup dapat disampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut.

a. Kesimpulan

1) Dimana dalam penelitian ini menggunakan Pengurus dan Anggota koperasi wanita sebagai fokus penelitian yaitu 3 (tiga) nama koperasi yang berlokasi di 3 (tiga) Desa, yakni ; 1) Koperasi Wanita “Puan Jaya” di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar, 2)

- Koperasi Wanita “Tutur Mandiri” di Desa Sooko Kecamatan Sooko, dan 3) Koperasi Wanita “Rukun Makmur” di Jambuwok Kecamatan Trowulan.
- 2) Kondisi usaha koperasi yang berada di daerah rawan bencana di Kabupaten Mojokerto, secara rata-rata berjalan baik dan menjalankan usaha sesuai kaidah usaha perkoperasian. Akan tetapi ditinjau dari skala usaha ada 1 (satu) koperasi terpilih masih berada dalam skala usaha relatif kecil dan lemah, sehingga untuk dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terpapar di kawasan rawan bencana, masih perlu diberikan pendampingan ke arah peningkatan peran koperasi, khususnya pada masa-masa terjadi bencana. Karena ketika terjadi bencana yang melanda kawasan di mana koperasi beroperasi, dapat diduga dampak bencana akan berpengaruh kepada sarana prasarana serta kegiatan usaha koperasi dan perekonomian masyarakat anggota koperasi dan masyarakat umum lainnya, baik dari sisi produksi, volume usaha, ketersediaan bahan baku maupun ekonomi rumah tangga.
 - 3) Model pemberdayaan ekonomi melalui Fasilitasi Perkuatan Usaha Program Dana Bergulir untuk pengembangan modal usaha dan tingkat kolektibilitas pinjaman (piutang) yang telah diberikan dengan fokus kondisi permodalan dan kolektibilitas pinjaman dilakukan karena ke tiga koperasi tersebut di atas masing-masing telah mendapatkan dana hibah untuk modal koperasi masing—asing sebesar Rp.50.000.000,- yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam 2 (dua) tahap pemberian/pencairan.

2. Rekomendasi

Disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Masyarakat anggota koperasi dan lembaga koperasi yang dipilih sebagai sampel penelitian peran pemberdayaan berharap ada model pendampingan kepada koperasi-koperasi sampel (Kopwan) untuk mendapat ilmu manajemen simpan pinjam yang baik untuk pengurus koperasi wanita.
- 2) Masalah manajemen usaha dan pengelolaan modal serta kolektibilitas piutang dalam kegiatan pendampingan peran menjadi perhatian dan sangat diharapkan oleh para pengurus koperasi untuk bisa diberikan secara berkala.
- 3) Pengembangan usaha koperasi, khususnya untuk koperasi terpilih untuk mendapatkan pengetahuan di bidang Simpan Pinjam (KSP) ke arah koperasi serba usaha (KSU) agar menjadi perhatian pihak-pihak terkait dan kompeten karena diperoleh data adanya koperasi yang mengalami perkembangan kinerja usaha relatif stagnasi, yang perlu perhatian untuk pengembangan sesuai aspirasi dari pengurus dan beberapa anggota

koperasi yang menghendaki koperasi dapat berkembang ke arah KSU, agar dapat meningkatkan peran di dalam melayani dan memberdayakan ekonomi masyarakat terpapar bencana di sekitar lokasi usaha koperasi itu sendiri.

- 4) Mendorong pemerintah daerah atau Dinas dan Badan terkait agar melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas masyarakat di desa terpapar bencana, dengan pelatihan dan simulasi penanganan bencana dan penguatan peran Koperasi yang ada di daerah rawan bencana.

H. Daftar Pustaka

- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman. (2009). *“Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan”*.
- Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya. (2010). *Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai Langkah DKP dalam Mendukung Pengembangan Wilayah.*, Jakarta: Kementerian Perikanan dan Kelautan.
- Giddens, Anthony.(2010); *Government Policy on Poverty Alleviation*. Jakarta: Kemerkokasra. Satria, A. (2010).
Governance, *Politics, and The State London*: Palgrave Macmillan
- Hendro Wardhono, *Kajian Resiko Bencana BPBD Kabupaten Nganjuk*, 2015
- Ken Blanchard,; *Empowerment, Takes More Than a Minute*, 2nd Edition, Penerbit Amara Books, Yogyakarta, 2002
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No 1/KEP/M.KUKM/II/2006 *tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008, *tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Perubahan Keputusan Menteri Koperasi PPK dan M No.351/KEP/M/XII/1998)*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008, *tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008, *tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.

Smith, Keith and Petley, David N. ; *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*. Fifth Edition. Routledge. New York, NY. 2009.

Teori Strukturasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. KPI Mina Soka Makmur. (2009). "*Proposal PNPM-KP: Sarana dan Pembesaran Ikan Nila*". Sleman: KPI Mina Soka Makmur. Pemerintah Desa Purwomartani. (2010).

Undang – Undang RI No. 25 Tahun 1992, *tentang Perkoperasian*

Undang – Undang RI No. 17 Tahun 2003, *tentang Keuangan Negara*

Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004, *tentang Perbendaharaan Negara Undang – Undang RI No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*